

Mengungkap Praktik Penentuan Harga Bekal Sawa Pada Ngaben Masal Dalam Bingkai Kearifan Lokal Budaya Lek (Studi Kasus Pada *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis, Desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng)

¹Kadek Arik Suprayoga

¹Anantawikrama Tungga Atmadja, ²Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi

**Program Studi Akuntansi S1
Universitas Pendidikan Ganesha,
Singaraja, Indonesia**

**e-mail: {ariksuprayoga90@gmail.com,
anantawikramatunggaatmadja@gmail.com, ekadianita@undiksha.ac.id}**

Abstrak

Penelitian ini mengungkap praktik penentuan harga bekal sawa yang menggunakan kelas sosial pada *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis untuk mengetahui : 1. proses penentuan harga bekal sawa yang berbeda-beda dengan menggunakan kelas sosial pada masing-masing sawa, 2. implikasi dalam penentuan harga bekal sawa yang berbeda-beda terhadap transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Penentuan harga bekal sawa dimulai dari penentuan harga terendah untuk kelas bawah dan untuk kelas menengah keatas disesuaikan dengan kelas sosial yang dipengaruhi oleh budaya *lek*, 2. Adanya sebuah kelas sosial dalam proses transparansi dan akuntabilitas tentunya memberikan implikasi yang berbeda-beda antar kelas sosial tersebut.

Kata kunci : *Dadia*, *ngaben*, kelas sosial, *lek*.

Abstract

This study revealed the practice of determining the amount of money supply for sawa (corpses) using social classes at Dadia Arya Gajah Para Banyuatis to find out: 1. the process of determining the amount of money supply for each sawa by using social classes, 2. the implications of determining different amount of money supply for the sawa on transparency and accountability. This study used qualitative method and the data collection techniques were in-depth interviews, observation and documentation study. The data analysis techniques used were data reduction, data display, data analysis, and conclusion drawing. The results showed that 1. The determination of money supply was influenced by culture and started by determining the lowest amount of money for the lower class and the amount for the middle class and above was adjusted, 2. The existence of social classes made the transparency and accountability gave different implications among social classes.

Keywords: *Dadia*, *Ngaben*, social class, *lek*.

PENDAHULUAN

Masyarakat Hindu di Bali dalam kehidupan sehari-harinya selalu berpedoman pada ajaran Agama Hindu warisan para leluhur Hindu di Bali, Salah satu wujud pengaruh agama Hindu Bali yang begitu meresap dalam kehidupan bermasyarakat adalah dapat dilihat pada sistem aktivitas ritual yang dilakukan oleh masyarakatnya baik secara individu maupun berkelompok. Didalam agama hindu terdapat upacara ritual untuk orang-orang yang telah meninggal dimana ritual suci ini termasuk kedalam *Pitra Yadnya* yaitu proses ritual kematian sampai ritual pensucian roh leluhur.

Upacara ritual untuk orang-orang yang telah meninggal (*Sawa*) dalam ajaran agama Hindu di Bali diselenggarakan melalui upacara *ngaben* atau *palebun*, dimana upacara *ngaben* atau *palebun* ini adalah suatu prosesi upacara pembakaran mayat ataupun ditanahkan (menjadi tanah). Dalam masyarakat hindu di Bali upacara *ngaben* adalah upacara yang harus dilaksanakan terutama oleh orang yang telah ditinggalkan, dalam hal ini pelaksanaan prosesi upacara *ngaben* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga tidak jarang ada orang yang tidak dapat melaksanakan upacara *pengabenan* ini karena terkendala oleh biaya atau dapat melaksanakan upacara *ngaben* tetapi dalam selang waktu yang lama setelah kematian.

Berdasarkan pengamatan Sukraliawan (2011) di Desa Sudaji Singaraja, besarnya dana *ngaben* yang diperlukan berkisar antara seratus lima puluh juta sampai dengan dua ratus juta rupiah. Namun dengan adanya *ngaben masal* biaya sebesar itu dapat diminimalkan (penghematan) dan dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang juga mendesak, hal ini sangat membantu bagi orang-orang yang memiliki keadaan ekonomi yang sulit tetapi harus melaksanakan kegiatan upacara *ngaben*.

Ngaben masal pada umumnya dilakukan di suatu *dadia* di Bali. Dimana *dadia* merupakan suatu klen atau organisasi kecil yang ada di Bali yang berasal dari satu keturunan atau leluhur yang sama. Salah satu *dadia* yang melaksanakan upacara

ngaben masal ini adalah *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis yang ada di desa Banyuatis Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Sumber pendanaan *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis dalam kegiatan upacara *ngaben masal* ini diperoleh dari 1. iuran wajib pada masing-masing *sawa* dengan menetapkan kelas sosial. Sorokin dalam Sadam Ardi (2013:2) menyatakan bahwa *social stratification* adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis), 2. iuran dari warga *dadia* per kepala keluarga, dan 3. punia spontan warga. Atas penggunaan dana dari sumber pendanaan tersebut diperlukan sebuah pertanggungjawaban untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis. Menurut Deddi Nordiawan (2008:129), Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Mardiasmo (2009:20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis terkait kelas sosial dapat dilihat dari penentuan harga bekal *sawa* dalam upacara *ngaben masal*.

Berbeda dengan proses penentuan harga pada umumnya, dalam rapat yang dilaksanakan oleh *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis ditentukan berapa iuran yang harus dibayar oleh pemilik *sawa* yang tergolong kelas bawah yang dimana dalam hal ini ditetapkan Rp.7.500.000 dengan disaksikan oleh anggota *dadia*.

Merujuk pada hal tersebut diatas terdapat penelitian-penelitian yang terkait dengan *ngaben*, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada

penentuan harga bekal *sawa* yang berdasarkan kelas sosial. Meres (2017) yang menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana upacara *ngaben masal* di *Dadia* Beten Aas II Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan upacara *ngaben masal* di desa bersangkutan sudah berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari adanya keterlibatan semua warga *dadia* dalam penentuan jumlah peturunan dan ikut serta dalam *sangkep*, dan adanya laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pengurus *dadia*. Penelitian lain, dilakukan oleh Firma Pratiwi (2015) yang mengungkap eksistensi pelaporan keuangan pada upacara *ngaben masal* di banjar pakraman Banyuning Tengah dan Banyuning Barat, desa pakraman Banyuning menunjukkan bahwa Proses penentuan biaya *ngaben* bersama pada desa bersangkutan utamanya ditentukan oleh banten, dan biaya-biaya lain, seperti transportasi, konsumsi dan lain-lain. Dalam membentuk akuntabilitasnya panitia *ngaben* bersama telah memegang teguh modal sosial berupa kepercayaan, dan konsep nilai agama Hindu.

METODE

Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan gabungan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiono, 2009:15). Terkait dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data diawali dengan melakukan wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi terkait dengan proses atau pencatatan yang dilakukan.

Setelah data dikumpulkan dilakukan reduksi data karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah. Maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah verifikasi dan kesimpulan, Pengambilan kesimpulan diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang mana kesimpulan penelitian akan menguraikan makna subjektif, serta temuan konsep atas permasalahan yang diteliti. Menurut Moleong (2010:324), mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan empat kriteria, sebagai berikut : 1. kepercayaan, 2. keteralihan, 3. kebergantungan, 4. Kepastian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penentuan Harga Bekal *Sawa* Menggunakan Kelas Sosial

Dalam proses penentuan suatu harga diperlukan suatu anggaran untuk menentukan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa Nafarin (2013:11).

Seperti halnya yang terjadi pada *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis juga menerapkan konsep anggaran dalam setiap kegiatannya, terlebih lagi kegiatan yang dilaksanakan tersebut melibatkan dana yang cukup besar. Salah satu kegiatan besar yang dilaksanakan oleh *Dadia* Arya Gajah Para adalah *ngaben masal*.

Pada proses penentuan harga bekal *sawa*, proses penentuan ini diawali dengan pembuatan anggaran dari panitia. Dalam pembuatan anggaran pada *ngaben masal* *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis melibatkan beberapa pihak diantaranya adalah *kelian dadia*, ketua panitia, sekretaris *dadia*, dan masing-masing seksi dalam panitia upacara *pengabenan*. Keterlibatan beberapa pihak ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari suatu anggaran, anggaran yang dipakai dalam *dadia* ini adalah anggaran kas. Rudianto (2009:7)

mengatakan Anggaran kas adalah rencana aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. hal ini dijelaskan oleh kelian *dadia* Nyoman Suisma :

“Ane (yang) terlibat dalam penentuan pembuatan anggaran itu panitia inti termasuk masing-masing seksi dan warga *dadia* dalam rapat. Pertama dari masing-masing seksi to misalnya seksi upacara kira-kira *kude meli* (berapa beli) banten? Dia nanya ke *tukang* (yang membuat) banten, dia survey harga, kemudian dilaporkan ke bapak, waktu itu bapak *ajak* (bersama) panitia inti kumpul membahas anggaran *ngaben*, setelah anggaran selesai dibuat lalu dirapatkan dalam paruman *dadia pang* (biar) warga *dadiane nawang* (*dadianya* tau), kemudian jika ada perubahan baru dirubah, misalnya seksi banten 200jt terlalu besar ini, *amone anggon* (sejumlah ini pakai), *len be* (kalau sudah) sepakat otomatis diganti *pang dadi* (biar jadi) anggaran yang benar”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh sekretaris *Dadia* Arya Gajah Para Banyuwatis Nyoman Birna, berikut :

“waktu itu tiang membuat bersama kelian *dadianya* bersama ketua panitia menyusun anggaran, penyusunan anggarannya itu berdasarkan laporan keuangan *ngaben* tahun sebelumnya, tetapi ada anggaran yang ditambahkan karena kan harga *barange jani* (barangnya sekarang) otomatis semakin *maal* (mahal), *care kebo anggo* (seperti kerbau dipakai) banten”

Pada dasarnya ketika sudah terbentuk suatu anggaran proses selanjutnya dilakukan pembagian secara merata untuk menentukan jumlah dana yang harus dikumpulkan untuk menutupi anggaran tersebut. Mengingat budaya yang berkembang di *dadia* ini yang dalam kaitannya dengan kegiatan *ngaben* selalu melibatkan kelas sosial maka dari itu dalam penentuan harga bekal *sawa* sangat dipengaruhi oleh adanya kelas sosial.

Menurut Soekanto (2009:207) kelas sosial adalah semua orang dari keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui oleh masyarakat umum.

Proses ini dimulai dari adanya suatu penentuan harga terendah yang ditetapkan oleh panitia berdasarkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk masing-masing *sawa* dimana biaya yang diutamakan adalah biaya banten. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kadek Yudiasa sebagai ketua panitia *pengabenan Dadia* Arya Gajah Para Banyuwatis :

“Jadi harga Rp.7.500 itu kita lihat dari biaya banten per masing-masing *sawa*, dimana disini kita memakai 1. banten arepan yang memiliki bagian uriaga, pisang jati, angenan, panyang irang lebeng matah, banten teben, petukon dan peneteh. 2. Banten pengawak yang memiliki bagian kajang sari, kajang kawitan, *ade ane madan* (ada yang namanya) ukur dan pengrekaan itu per *sawa*, nah kalo kita kalkulasi harga sekarang uriage itu minimal harganya Rp. 500.000 untuk 1 banten, pisang jati harganya Rp. 250.000 terus kemudian panyang irang Rp. 250.000 itu harga riil itu harga lapangan, terus kemudian angenan Rp. 150.000. nanti itu biar ketemu Rp. 7.500.000 itu yang menjadi kebijakan harga itu adalah di pengawak, pengrekaan, dan tirta pengentas, itu yang *nyangkepin*. Itu tidak bisa dihitung nilainya karena itu kebijakan pedanda dan pemuput karena itu menyangkut masalah mantram”.

Setelah biaya terendah ditetapkan untuk kelas terendah, proses selanjutnya adalah pengumuman harga minimal yang harus dibayar oleh masing-masing pemilik *sawa*, proses ini terjadi pada paruman rutin yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Terkait dengan hal tersebut panitia dalam hal ini adalah sekretaris panitia *pengabenan* akan melakukan pemanggilan kepada masing-masing pemilik *sawa* untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing pemilik *sawa*, proses ini akan disaksikan oleh seluruh warga *Dadia* Arya

Gajah Para Banyuatis, sehingga ketika pemilik *sawa* yang berada di kelas menengah keatas namun menempatkan dirinya pada kelas terbawah secara tidak langsung pemilik *sawa* tersebut akan merasa tidak enak hati yang dalam budaya bali disebut dengan budaya *lek*. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kadek Arsa selaku pemilik *sawa* :

“*len tiang sing juari tiang mayah bedik* (kalau saya malu kalau saya bayar sedikit) karena kita kan ekonomi sudah agak mapan, ya kita kan biar sedikit lah lebih dari orang lain, kita tetaplah punya perasaan malu namanya juga manusia”.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Nyoman Birna sebagai salah satu pemilik *sawa*, berikut :

“Kalau *tiang* (saya) *ngelah* (punya) *umah* (rumah) *amone* (sebesar ini) kan *sing* (tidak) mungkin *dadine* (jadinya) di kelas bawah, pasti *tiang* (saya) ngambil kelas menengah dan hal itu juga sudah diketahui oleh warga, *nah* (ya) disamping *keneh* (pemikiran) *tiang* (saya) membantu *tiang* (saya) juga ada rasa *sing juari* (malu) *bes* (terlalu) *abedik* (sedikit) *mayah* (membayar)”

Menurut pandangan W. Keeler dalam Hutagalung (2007) budaya malu (*shame culture*) adalah kebudayaan dimana pengertian-pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status dan gengsi sangat ditekankan.

Implikasi Penentuan Harga Bekal *Sawa* yang Berbeda-beda Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Penentuan harga bekal *sawa* yang berbeda-beda memberikan implikasi tersendiri bagi pemilik *sawa* terhadap adanya transparansi dan akuntabilitas. Implikasi tersebut berbeda antara pemilik *sawa* yang berada di kelas atas dan menengah dengan kelas bawah. Kelas atas, kelas ini ditandai oleh besarnya kekayaan, pengaruh baik dalam sektor-sektor masyarakat perseorangan ataupun umum, berpenghasilan tinggi, tingkat pendidikan

yang tinggi, dan kestabilan kehidupan keluarga (Sorokin dalam Sadam Ardi, 2013:2). Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa pemilik *sawa* yang menempati kelas sosial ini tentunya mempunyai pendidikan yang tinggi yang secara tidak langsung memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Adanya pemahaman yang baik dapat mengakibatkan pemilik *sawa* yang berada dalam kelas atas ini cenderung lebih kritis dan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas atas dana yang dikelola. Terlebih lagi, dana yang dikeluarkan oleh pemilik *sawa* ini lebih tinggi dibandingkan pemilik *sawa* yang ada pada kelas bawah. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kadek Arsa sebagai pemilik *sawa* yang tergolong kelas atas :

“Secara tidak langsung bapak menuntut adanya transparansi nah itu kan semuanya harus dilaporkan, setiap laporan apapun kan semua sudah ada laporannya, sebenarnya dari saat kegiatan berjalanpun kita sudah tau kemana-kemana saja uang itu dilihat dari pengeluaran-pengeluaran yang besar itu”

Implikasi yang sama juga ditunjukkan oleh pemilik *sawa* pada kelas menengah. Menurut Sorokin dalam Sadam Ardi (2013:2) menyatakan bahwa kelas menengah merupakan kelas yang di tandai oleh tingkat pendidikan yang tinggi, penghasilan dan mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap kerja keras, pendidikan, kebutuhan menabung dan perencanaan masa depan, serta mereka dilibatkan dalam kegiatan komunitas. Secara karakteristik, kelas menengah ini tidak jauh berbeda dengan kelas atas. Begitupula pada pemilik *sawa* yang ada di kelas menengah cenderung menginginkan adanya sebuah transparansi dan akuntabilitas terkait dana yang dikelola. Hal ini didasari oleh bekal *sawa* yang dibayarkan pemilik *sawa* pada kelas menengah lebih tinggi dibandingkan kelas bawah. Hal lainnya disampaikan oleh Nyoman Budiana sebagai pemilik *sawa* yang tergolong kelas menengah :

“Setiap kegiatan organisasi yang berhubungan dengan uang itu sudah otomatis memerlukan transparansi

dari bendahara tersebut, walaupun kami kelas menengah misalnya dalam memberikan iuran wajib itu sebenarnya kami ikhlas tetapi untuk itu harus ada pertanggungjawaban atau berupa laporan keuangan daripada bendahara, kami hanya ingin tau sejauh mana transparansi dari bendahara tersebut, itu tujuannya kedepannya untuk melaksanakan kegiatan itu ada kepercayaan dari pemilik sawa terhadap bendahara”

Berbeda pada pemilik sawa yang berada di kelas bawah, yang berdasarkan teori kelas sosial oleh Sorokin dalam Sadam Ardi (2013:2) mengungkapkan bahwa kelas bawah merupakan kelas yang biasanya terdiri dari kaum buruh kasar, penghasilannya pun relatif lebih rendah sehingga mereka tidak mampu menabung, lebih berusaha memenuhi kebutuhan langsung daripada memenuhi kebutuhan masa depan, berpendidikan rendah, dan penerima dana kesejahteraan dari pemerintah. Sama halnya dengan pemilik sawa yang berada dalam kelas bawah ini dengan pengetahuan yang relatif rendah tentunya pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas juga rendah. Ditambah lagi dengan kondisi penghasilan pemilik sawa yang rendah tentu mengakibatkan bekal sawa yang dibayarkan juga rendah jika dibandingkan dengan pemilik sawa atas dan menengah. Berdasarkan hal tersebut, tentunya pemilik sawa yang berada di kelas bawah ini cenderung tidak menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal yang paling diutamakan adalah penggabungan dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pemilik sawa dapat tercapai. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Nyoman Suparma sebagai pemilik sawa yang tergolong kelas bawah :

“Yang penting *kene* (begini), apapun penyelesaiannya sudah diterima dengan hati ikhlas, bapak *sing* (tidak menuntut yang penting *be kelar gegaene* (sudah selesai pekerjaannya), keluarga *be* (sudah aman-aman kan *nau* (senang)

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas terkait dengan dana penggabungan harus dilakukan dengan baik. Dengan adanya tuntutan dari pemilik sawa yang tergolong kelas menengah dan kelas atas tersebut, maka panitia penggabungan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi Menurut Deddi Nordiawan (2008:129) adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dadia Arya Gajah Para Banyuwatis membangun kepercayaan dengan memberikan keterbukaan informasi dalam proses perencanaan kegiatan upacara *ngaben masal*, tentunya dengan memberikan informasi mengenai total anggaran dan berapa jumlah minimal yang harus dibayar oleh masing-masing pemilik sawa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nyoman Suisma sebagai *kelian dadia* :

“Setelah anggaran selesai dibuat lalu dirapatkan dalam paruman *dadia pang* (biar) warga *dadiane nawang* (*dadianya* tau), kemudian jika ada perubahan baru dirubah, misalnya seksi banten 200jt terlalu besar ini, *amone anggon* (sejumlah ini pakai), *len be* (kalau sudah) sepakat otomatis diganti *pang dadi* (biar jadi) anggaran yang benar”

Begitu juga keterbukaan dalam proses penggunaan sumber pendanaan dalam kegiatan upacara *ngaben masal*, dijelaskan oleh *kelian dadia* :

“Setelah rapat kecil membentuk laporan baru kita rapat bersama kita sampaikan pada seluruh warga, dengan upacara pada waktu upacara tahun ini dengan RAB sekian, sumber dananya dari ini, ini ,ini dengan jumlah sekian dan pengeluarannya ini ini ini dengan jumlah sekian dan ada saldo

sekian, saldonya itu masuk ke kas *Dadia*”

Keterbukaan yang dilakukan oleh pengurus *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis dalam proses penentuan jumlah iuran wajib pada masing-masing pemilik *sawa* dan penggunaan dananya dimaksudkan untuk memberikan informasi jumlah dana yang terkumpulkan dan penggunaan dana untuk pelaksanaan *ngaben masal*.

Prinsip keterbukaan di *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis dalam pelaksanaan upacara *ngaben masal* semakin tercermin dari pencatatan langsung yang dilaksanakan setelah mendapatkan beberapa sumber dana terutama dalam *dana punia*. Dalam perolehan *dana punia*, *punia* langsung dicatat di buku *punia* dan papan pencatatan *punia* dan kemudian setelah kegiatan upacara *ngaben masal* selesai maka *punia-punia* tersebut akan dilaporkan kepada seluruh warga agar warga *dadia* dapat mengetahui siapa saja yang sudah melakukan *punia* beserta jumlahnya.

Dadia dalam menjalankan prinsip akuntabilitas harus mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta berorientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Pertanggungjawaban pengelolaan dana upacara *ngaben masal* di *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis sudah dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu dengan membuat laporan keuangan dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan pada saat rapat yang dilaksanakan oleh *dadia*. Untuk pertanggungjawaban pada saat *ngaben masal* ini dilakukan setelah upacara *pengabenan* selesai dilaksanakan. Ini dapat dilihat dari pernyataan Ketua *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis berikut:

“Setelah upacara selesai ada rapat kecil dulu khusus untuk panitia yang berhubungan dengan uang, yang membawa uang dari masing-masing sie melaporkan saya sie transportasi dengan anggaran sekian saya bawa uang sekian pengeluaran sekian ini laporannya disertai dengan catetan catatannya, nah setelah rapat itu jika sudah ada hasil, panitia sudah menyepakati tidak ada permasalahan, jika ada misalnya biaya janggal itu

diluruskan dulu, setelah rapat kecil membentuk laporan baru kita rapat bersama kita sampaikan pada seluruh warga, pada upacara tahun ini dengan RAB sekian, sumber dananya dari ini, ini, ini dengan jumlah sekian dan pengeluarannya ini ini ini dengan jumlah sekian dan ada saldo sekian, saldonya itu masuk ke kas *dadia*”

Dengan cara mengadakan rapat inilah warga *Dadia* Arya Gajah Para Banyuatis dapat mengetahui posisi keuangan *dadianya*. Hal tersebut sesuai dengan definisi dari akuntabilitas publik. Mardiasmo (2009:20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam pengelolaan dana terdapat suatu proses dari penerimaan kas sampai pengeluaran kas oleh *Dadia* Arya Gajah Para dalam hal pelaksanaan upacara *ngaben masal* secara terperinci dijelaskan sebagai berikut :

Dalam proses penerimaan kas pada upacara *ngaben masal* terdapat penerimaan kas dari iuran wajib masing-masing pemilik *sawa* dan iuran dari masing-masing kepala keluarga. Pada penerimaan kas dari iuran wajib masing-masing pemilik *sawa* diawali dengan pencatatan yang dilakukan oleh sekretaris *dadia* dengan mencatat nama-nama dari pemilik *sawa* beserta berapa jumlah uang yang akan nanti dibayarkan sebagai iuran, setelah semua nama-nama terkumpul catatan tersebut akan diserahkan ke bendahara umum sebagai dasar penagihan iuran kepada masing-masing pemilik *sawa*. Bendahara umum dalam pengumpulan iuran wajib tersebut memberikan kwitansi kepada pemilik *sawa* sebagai tanda bukti bahwa pemilik *sawa* tersebut telah membayar sesuai dengan iuran yang telah didaftarkan pada sekretaris.

Pada penerimaan kas dari iuran masing-masing kepala keluarga, Dalam proses ini masing-masing *kelian tempek*

akan melakukan pengumpulan iuran dari masing-masing kepala keluarga dengan memberikan kwitansi sebagai bukti pembayarannya. Setelah uang tersebut terkumpul maka akan langsung diserahkan kepada bendahara umum. Fungsi penerimaan kas dalam upacara *ngaben masal* dapat dapat dicerminkan dari pernyataan bendahara umum *ngaben masal* berikut ini:

“Untuk iuran dari masing-masing *sawa* itu dicatat dalam kwitansi sebagai tanda bukti, berdasarkan kwitansi penerimaannya dan dicatat dalam pembukuan, begitu juga dengan iuran wajib dari masing-masing kepala keluarga ada perwakilan yang memungut kemudian diserahkan kepada saya”.

Dalam proses pengeluaran kas pada upacara *ngaben masal* terdapat pengeluaran kas dari bendahara umum ke bendahara atau ketua dari masing-masing seksi agar dapat memenuhi kebutuhan dari masing-masing seksi. Dalam proses ini bendahara atau ketua dari masing-masing seksi akan dipanggil dan terjadi penyerahan uang, untuk seksi yang membutuhkan dana yang banyak dilihat sesuai dengan anggaran maka bendahara akan memberikan dana tersebut secara bertahap seperti seksi konsumsi dan seksi upacara, tetapi untuk seksi yang memakai dana tidak terlalu banyak maka dana tersebut akan diserahkan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat seperti seksi tamu dan seksi dekorasi. Dalam penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi sebagai bukti penyerahan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nyoman Artama sebagai bendahara umum :

“Pencatatan uang yang keluar untuk masing-masing seksi melalui kwitansi *masi* (juga) dan dicatat di buku pengeluarannya segini. Dalam kwitansi *to be misi* (itu sudah berisi) seksi *kene nyemak amone* tanggal *mone* (seksi ini mengambil segini tanggal segini)”.

Dari masing-masing seksi yang telah menerima uang tersebut maka masing-masing seksi akan mengelola dananya

sendiri untuk keperluan dalam seksinya dalam hal upacara *ngaben masal*.

Dalam proses pengeluaran kas oleh masing-masing seksi dipergunakan oleh bendahara atau ketua dari masing-masing seksi dan juga anggotanya disertai dengan nota pembelian, jika bendahara atau ketua yang memakai uang tersebut maka nota pembelian tersebut akan langsung disimpan, jika anggota yang membeli barang maka nota pembelian tersebut akan diserahkan kepada ketua atau bendahara sebagai bukti pertanggungjawaban atas barang apa yang dia beli.

Untuk pembelian-pembelian yang tidak dapat disertai dengan nota dari tokonya sendiri seperti pembelian sayur dan lain-lain bendahara atau ketua seksi hanya mencatat dalam pembukuan, dalam hal ini ketua atau bendahara memakai asas kepercayaan terhadap anggotanya yang membeli barang tersebut. Setelah nota-nota dan catatan-catatan tersebut terkumpul semuanya maka akan direkap oleh bendahara ataupun ketua seksi yang akan digunakan nanti dalam proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Desak Ketut Purnama Sari sebagai ketua seksi konsumsi :

“Nah pada saat acara-acara seperti ini kan kita tidak bisa katakanlah sekarang yang berbelanja itu tukang cuci prabot kita kasi uang 1 juta terus misalnya bli sayur kan tidak mungkin kita minta nota, itu kita pakek asas kepercayaan, mereka datang dari pasar mereka pasti melapor ke tante “buk tadi belanja ini ini” nanti tante dah yang nyatet bli ini bli ini. “ini kembaliannya misalnya 200 ribu” “oh iya bawa dah dulu karena besok belanja lagi” nanti tante kasi lagi gitu, jadi itu asas kepercayaan murni, jadi kalo ada nota kita minta nota kalo tidak yaa kita tidak memaksakan, kan tidak mungkin kita di tempat sayur kita minta nota dan kita juga memberikan uang itu kepada orang yang betul-betul kita percaya, tidak sembarangan udah ada orang-orangnya. nota-nota itu nanti tante kumpulkan sesuai dengan klasifikasinya dan dijepret dijadikan satu untuk pembuatan laporan keuangan”.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana upacara *ngaben masal* di *Dadia* Arya Gajah Para Banyuwatis sudah cukup baik, yaitu dengan adanya pembagian tugas, laporan pertanggungjawaban dan adanya akses publik pada informasi atas suatu keputusan yang telah dibuat.

IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini menemukan bahwa harga bekal *sawa* ditentukan berdasarkan kelas sosial yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah, dimana dalam hal ini penentuan untuk harga terendah dalam kelas bawah ditetapkan oleh panitia. Untuk kelas menengah dan kelas atas ditentukan berdasarkan kemampuan yang diukur oleh diri sendiri dan dipengaruhi oleh budaya *lek*. Penelitian ini juga menemukan bahwa masing-masing kelas memberikan tanggapan yang berbeda-beda terkait dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana upacara *pengabenan*.

Implikasi dari penelitian ini adalah meningkatnya penerapan transparansi dan akuntabilitas oleh *Dadia* Arya Gajah Para Banyuwatis dalam pengelolaan dana upacara *pengabenan*. Implikasi lain dari penelitian ini adalah *dadia-dadia* lain mengetahui pentingnya diterapkannya kelas sosial yang dipengaruhi oleh budaya *lek* dalam proses penentuan iuran wajib pada masing-masing pemilik *sawa* dalam pelaksanaan upacara *ngaben masal*, dengan demikian warga *dadia* yang tergolong kelas bawah merasa terbantu karena iuran wajib yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Selain itu juga penelitian ini berimplikasi kepada warga *dadia* yaitu lebih meningkatnya kesadaran dan rasa gotong royong dari warga *dadia* untuk membantu kegiatan upacara *pengabenan* agar dapat berjalan dengan lebih baik melalui iuran wajib yang dibayarkan maupun tenaga yang disumbangkan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dadia Arya Gajah Para dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan *ngaben masal* ini selalu melibatkan kelas sosial seperti halnya dalam proses penentuan harga bekal *sawa*. Dalam proses penentuan harga bekal *Sawa*, dibuatkan suatu anggaran terlebih dahulu untuk menentukan berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pemilik *sawa*, Mengingat budaya yang berkembang di *dadia* ini yang dalam kaitannya dengan kegiatan *ngaben* selalu melibatkan kelas sosial maka dari itu dalam penentuan harga bekal *sawa* sangat dipengaruhi oleh adanya kelas sosial tersebut. Dalam hal ini ditetapkan harga terendah oleh panitia dengan biaya banten sebagai dasar utama dalam penentuannya. Harga yang harus dibayar adalah minimal Rp. 7.500.000. Berdasarkan hal tersebut masing-masing dari pemilik *sawa* akan memosisikan dirinya berada dikelas yang bawah, menengah, atau atas. Dari hal tersebut pemilik *sawa* yang berada dikelas menengah dan atas akan membantu kegiatan *ngaben masal* tersebut dengan membayar lebih dari harga minimal sesuai dengan kemampuannya, ketika pemilik *sawa* menempatkan dirinya dalam kelas yang lebih rendah dari kelas yang seharusnya maka akan muncul rasa malu atau yang dalam budaya bali disebut dengan budaya *lek*.

Adanya sebuah kelas sosial dalam proses transparansi dan akuntabilitas tentunya memberikan implikasi yang berbeda-beda antar kelas sosial tersebut. Kelas atas memiliki pendidikan dan pekerjaan yang lebih tinggi akan cenderung lebih kritis, terlebih lagi jumlah dana yang dikeluarkan lebih besar. Kelas menengah yang memiliki kriteria yang hampir sama dengan kelas atas akan cenderung bersikap demikian. kelas bawah cenderung mengabaikan adanya transparansi dan akuntabilitas yang diakibatkan oleh faktor pendidikan dan jumlah dana yang dikeluarkan lebih kecil.

SARAN

Bagi Dadia Arya Gajah Para Banyuwatis, Hendaknya bendahara umum harus mengontrol ketua atau bendahara dari masing-masing seksi agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang menyebabkan terhambatnya dalam proses pertanggungjawaban dari masing-masing seksi ke bendahara umum. Selain itu terkait dengan bukti transaksi hendaknya orang yang menggunakan dana tersebut harus memberikan bukti walaupun dalam bentuk catatan yang sederhana karena dalam penggunaan uang, terlebih lagi dalam penggunaan uang yang banyak tidak cukup hanya dengan menggunakan asas kepercayaan. Selain itu juga terkait dengan keterlibatan, pemilik sawa kelas menengah dan kelas atas hendaknya selalu dilibatkan dalam setiap proses kegiatan *ngaben masal* terlebih lagi yang berkaitan dengan proses pengelolaan dana *pengabenan*.

Bagi warga Dadia Arya Gajah Para Banyuwatis, hendaknya warga *dadia* tepat waktu dalam membayar iuran masing-masing kepala keluarga agar proses upacara *pengabenan* dapat berjalan dengan lancar.

Bagi peneliti selanjutnya, pada penelitian ini peneliti tidak mengungkapkan tingkat efektivitas dari penerapan penentuan harga bekal sawa dengan menggunakan kelas sosial dalam suatu *dadia* pada upacara *pengabenan*. Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk mengukur tingkat efektivitas dari penerapan penentuan harga bekal sawa dengan menggunakan kelas sosial agar dapat mengetahui seberapa efektif diterapkannya kelas sosial pada suatu *dadia*.

DAFTAR PUSTAKA

Ardi, Sadam. 2013. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 23 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak T.A 2012/2013. *Jurnal Mahasiswa Universitas Tanjungpura Volume 01 No. 01 Tahun 2013*.

Hutagalung, Mura P. 2007. Budaya Malu, Budaya Salah, dan Budaya Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3*

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Meres, Ni Wayan. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Upacara Ngaben Masal di Dadia Beten Aas II Dusun Muntigunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Moleong. 2010. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi. dkk. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Pratiwi, Firma. 2015. *Eksistensi Pelaporan Keuangan Pada Upacara Ngaben Masal di Banjar Pakraman Banyuning Tengah dan Banyuning Barat, Desa Pakraman Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha.

Rudianto. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukraliawan, I Nyoman. 2011. Reinterpretasi Makna Ngaben Massal Pada Masyarakat Desa Sudaji: Suatu Kajian Budaya. *Jurnal Sains dan Teknologi. Universitas Panji Sakti Volume 11 No. 1, 120-133*.